

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

**DIREKTORAT PENDAFTARAN DAN PEMERIKSAAN LHKPN
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI**



Komisi Pemberantasan Korupsi

LHKPN

Daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara (beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan) yang dituangkan di dalam Formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK.

• Manfaat pelaporan harta

- Penanaman sifat keterbukaan dan tanggung jawab;
- Penyediaan sarana kontrol masyarakat;
- Kerapihan administrasi dokumen harta;
- Menghindari fitnah.

Dasar Hukum LHKPN

UU No. 28/1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari KKN

UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

KEP KPK Nomor 07 / KPK / 2 / 2005
tentang Tata Cara Pendaftaran,
Pengumuman dan Pemeriksaan LHKPN

Kewajiban PN (UU 28 Tahun 1999)

Pasal 5 ayat (2)

- **Bersedia diperiksa harta kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat**

Pasal 5 ayat (3)

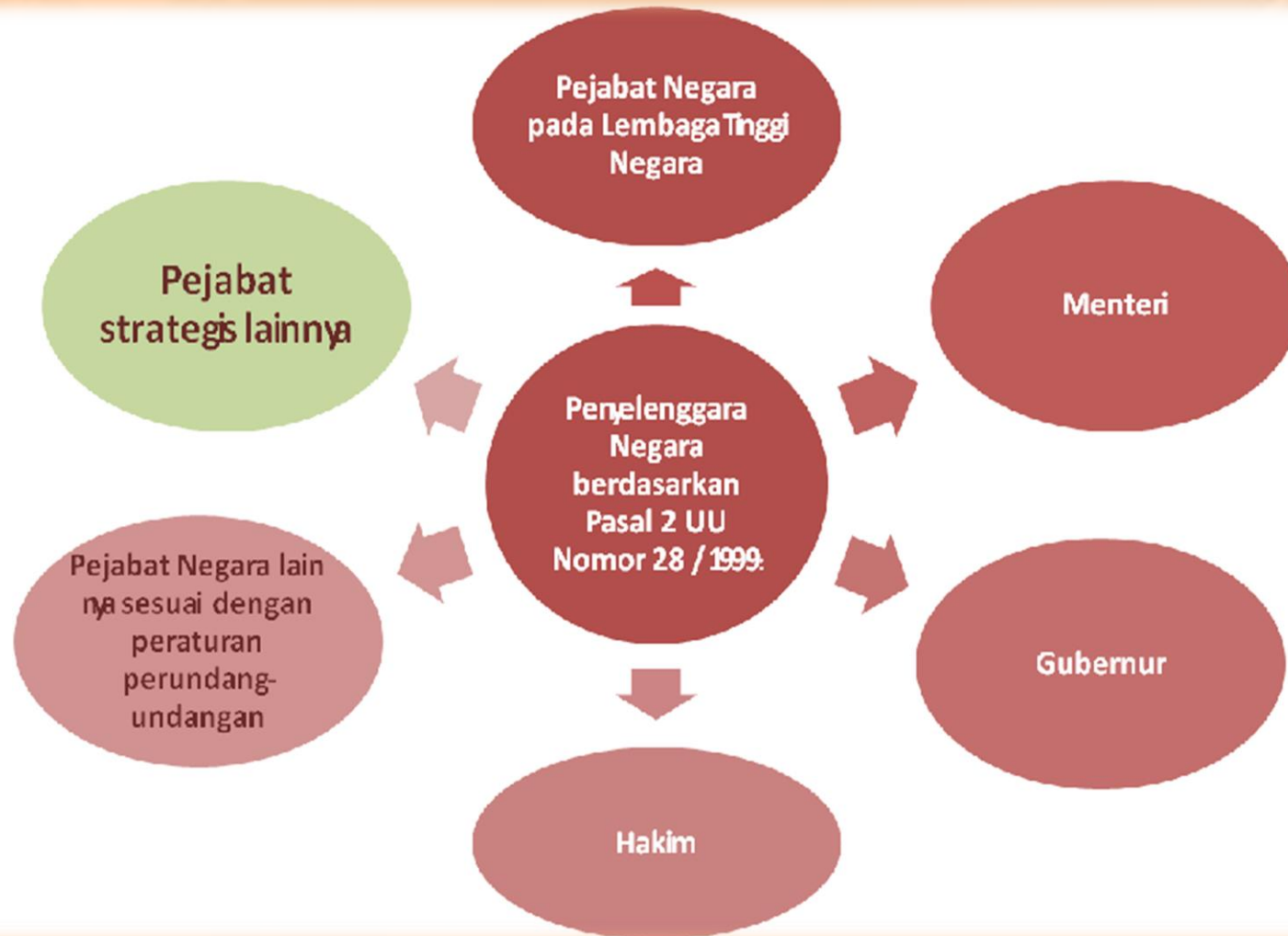
- **Melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya sebelum dan sesudah menjabat**

Kewenangan KPK

(UU 30 Tahun 2002)



Wajib lhkpn menurut UU No. 28 Th 1999 PASAL 2



Penjelasan UU No. 28 Th 1999 Pasal 2, angka (7)

Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis :

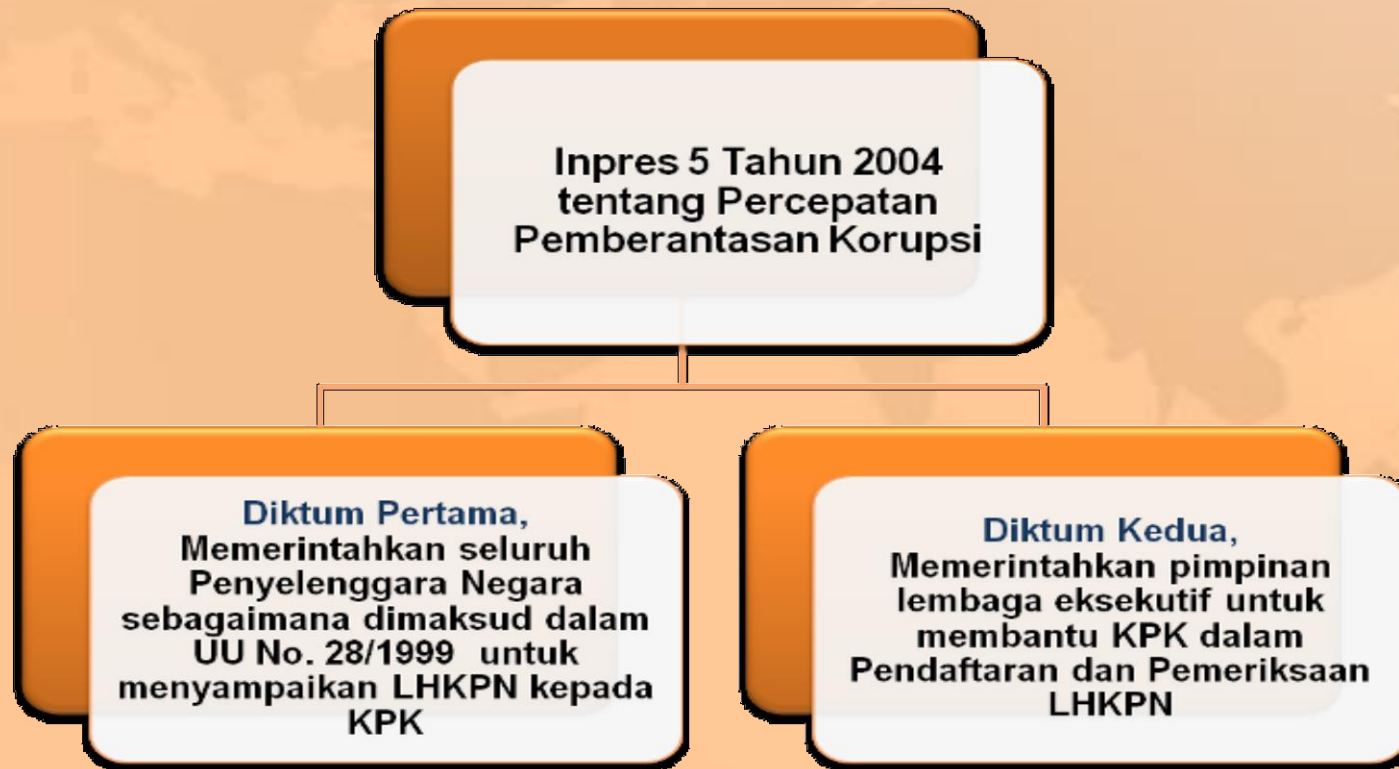
- Direksi, Komisaris & Pejabat struktural lainnya pada BUMN dan BUMD
- Pimpinan Bank Indonesia
- Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
- Pejabat Es. I dan Pejabat lain yang disamakan
- Jaksa
- Penyidik
- Panitera Pengadilan
- Pemimpin & bendaharawan proyek

WAJIB LHKPN SESUAI DENGAN UU No. 32 Th.2004 Pasal 58

Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
adalah WNI yang memenuhi syarat :

- (i) menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan
bersedia untuk diumumkan

Komitmen Pemerintah dalam Pemberantasan KORUPSI



Regulasi Pendukung untuk Eksekutif (1)

SURAT EDARAN MENPANRB

SE/05/M.PAN/4/2006

Memerintahkan Pimpinan Instansi untuk:

- Mengeluarkan Penetapan Wajib LHKPN
- Menugaskan Unit Kepegawaian untuk mengelola LHKPN
- Menugaskan SPI untuk memonitor Penyampaian LHKPN

SE/01/M.PAN/2008

Memerintahkan Pimpinan Instansi untuk:

- Tidak mengusulkan PNS untuk menduduki Jabatan apabila tidak menyampaikan Jabatan
- Tidak melantik PNS yang diangkat dalam Jabatan apabila yang bersangkutan belum menyampaikan LHKPN

SE MENPANRB

No.05 Th. 2012

Kewajiban Penyampaian dan Sanksi Atas Keterlambatan Penyampaian LHKPN di Lingkungan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah

Regulasi Pendukung untuk Komisi Pemilihan Umum

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 53/SK/KPU/TAHUN 2008

**Tentang
PENETAPAN WAJIB LAPOR KEKAYAAN BAGI PEJABAT YANG
MEMANGKU JABATAN STRATEGIS DAN POTENSIAL/RAWAN
KKN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN/KOTA**

Formulir LHKPN



The image shows the cover of the LHKPN Model KPK-A form. It is a yellow document with a black border. At the top left, it says "TIDAK DIPERJUALBELIKAN". At the top right, it says "LHKPN MODEL KPK-A". In the center, there is the Garuda Pancasila emblem. Below the emblem, it reads "KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA". At the bottom, it reads "FORMULIR LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA".

LHKPN MODEL KPK-A

Diisi oleh PN/Pejabat Wajib LHKPN untuk yang pertama kalinya



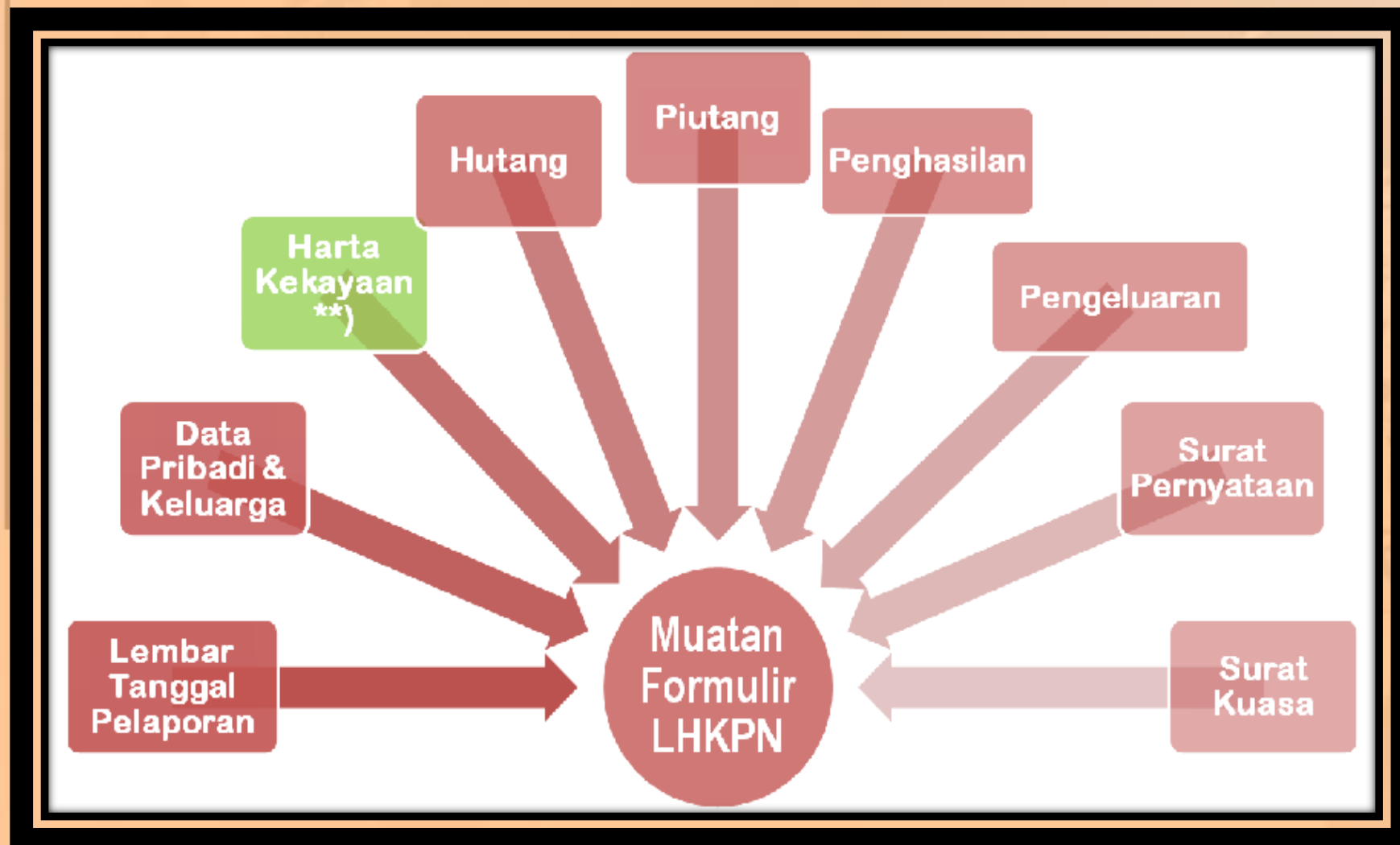
The image shows the cover of the LHKPN Model KPK-B form. It is a light blue document with a black border. At the top left, it says "TIDAK DIPERJUALBELIKAN". At the top right, it says "LHKPN MODEL KPK-B". In the center, there is the Garuda Pancasila emblem. Below the emblem, it reads "KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA". Below that, it reads "FORMULIR PERUBAHAN DATA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA". At the bottom, it reads "PER : []/[]/[] (Tgl./Bln./Thn.)".

LHKPN MODEL KPK-B

Diisi oleh PN/Pejabat Wajib LHKPN yang telah menyampaikan LHKPN Model KPK-A, apabila:

1. Mengalami perubahan jabatan (mutasi/promosi/pensiun)
2. Dua tahun dalam jabatan yang sama
3. Sewaktu-waktu atas permintaan KPK

Muatan LHKPN



Harta yang dicantumkan



Kepemilikan Harta

ATAS NAMA:

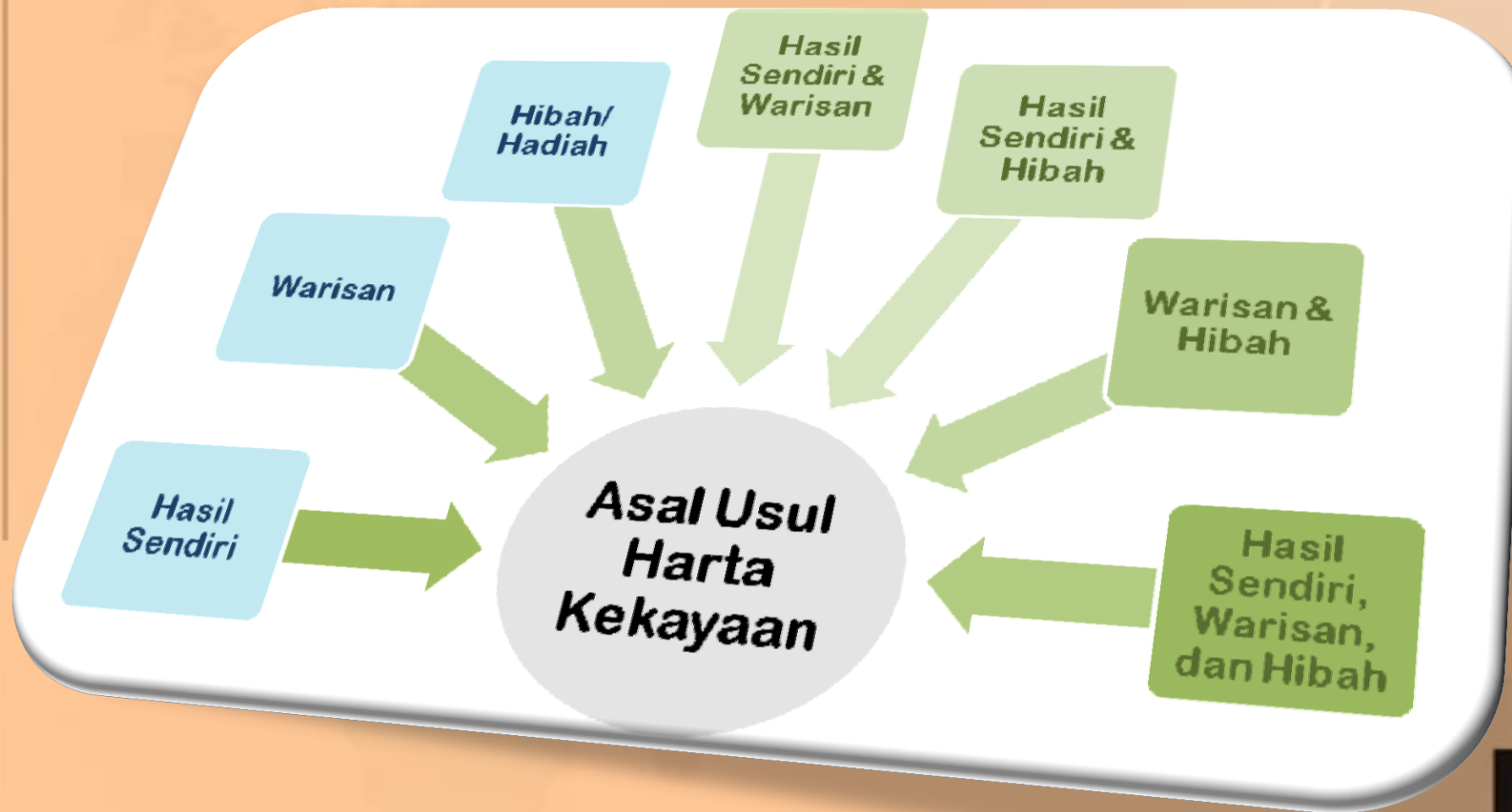
.....

HUBUNGAN KELUARGA:

1. Yang bersangkutan
2. Isteri/Suami
3. Anak
4. Lainnya *

** : Kekayaan milik Penyelenggara Negara atau Keluarga namun yang belum dibaliknamakan.*

Asal usul harta



Cara Memperoleh Formulir

Mengunduh dari *www.kpk.go.id*

Memfotokopi Formulir LHKPN sesuai kebutuhan

Mengajukan permintaan kepada Direktorat Pendaftaran & Pemeriksaan LHKPN (Costumer Services)

TIDAK HARUS
MENGUNAKAN
FORMULIR ASLI

Tips Pengisian Formulir LHKPN

Kumpulkan semua dokumen pendukung atau bukti kepemilikan harta.

Isi formulir LHKPN secara jujur, benar dan lengkap.

Susun dokumen pendukung sesuai dengan susunan formulir LHKPN.

LHKPN dan pendukungnya jangan di jilid atau distapler, gunakan clip binder.

Copy formulir dan dokumen pendukung untuk arsip, sebagai dasar dalam pengisian formulir selanjutnya.



KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

2009

T a m b a h a n B e r i t a N e g a r a R . I . T a n g g a l 6 Oktober 2009 N o . 80
Pengumuman dalam Berita Negara RI sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28
Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

PENGUMUMAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA BANDUNG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : WAHYUDI
2. Jabatan : BENDAHARA – DINAS PERTAMANAN
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
3. Tempat & Tanggal Lahir : BANDUNG, 12 Juni 1980
4. Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
5. Nama Istri : NY. SRIENDI
6. Alamat Kantor : JL. RAYA BANDUNG NO. 121
7. Tanggal Pelaporan : 20 Agustus 2009

II. DATA HARTA

A. HARTA TIDAK BERGERAK (TANAH DAN BANGUNAN) Rp. 77.220.000

1. Tanah seluas 110 m², di Kota JAKARTA TIMUR, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2006, NIOP Rp.77.220.000

B. HARTA BERGERAK

a. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN LAINNYA Rp. 11.000.000

1. Motor, merk SUZUKI THUNDER, tahun pembuatan 2007 yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2007 nilai jual Rp.11.000.000

b. PETERNAKAN, PERIKANAN, PERKEBUNAN, PERTANIAN, PERKUTANAN, PERTAMBANGAN DAN USAHA LAINNYA Rp. 0

c. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 60.000.000

1. BENGA BERGERAK LAINNYA, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan dari tahun 2006 sampai dengan 2009 dengan nilai jual Rp.60.000.000

C. SURAT BERTAGAK Rp. 0

D. GIRO DAN SETARA KAS LAINNYA Rp. 40.936.460

1. Yang berasal dari HASIL SENDIRI dengan nilai Rp 40.936.460

E. PIUTANG Rp. 0

TOTAL HARTA (II) Rp. 189.156.460

III. HUTANG Rp. 0

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II - III) Rp. 189.156.460

MENGETAHUI,
DEPUTI BIDANG Pencegahan
DEPUTI

Jakarta, 10 September 2009
DATA DIPROSES OLEH,
DIREKTORAT PENDAFTARAN
DAN PEMERIKSAAN LHKPN
DIREKTUR

CONT OH



KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Tambahan Berita Negara RI Tanggal 6 Maret 2012 No. 19

Melalui Pengumuman ini maka Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan ketentuan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

**PENGUMUMAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Perubahan atas Laporan Harta Kekayaan yang dilaporkan sebelumnya)**

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA BANDUNG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : WAHYUDI
2. Jabatan : BENDAHARA – DINAS PERTAMAMAN
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
3. NIK : 4456
4. Tempat & Tanggal Lahir : BANDUNG, 12 Juni 1980
5. Alamat Kantor : JL. RAYA BANDUNG NO. 121
6. Tanggal Pelaporan : 20 Agustus 2009, 31 Desember 2011

II. DATA HARTA

**A. HARTA TIDAK BERGERAK
(TANAH DAN BANGUNAN)**

	20 Agustus 2009	31 Desember 2011
1. Tanah seluas 110 m2, di Kota JAKARTA TIMUR, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2008 (Penambahan Data Karena Tijual)	Rp. 77.220.000	Rp. 228.240.000
2. Tanah & Bangunan seluas 120 m2 & 120 m2, di Kota JAKARTA TIMUR, yang berasal dari HASIL SENDIRI / perolehan tahun 2010 (Penambahan Data Baru)	—	Rp. 228.240.000

B. HARTA BERGERAK

**a. ALAT TRANSPORTASI
DAN MESIN LAINNYA**

	20 Agustus 2009	31 Desember 2011
1. Motor, merk SUZUKI THUNDER, tahun pembuatan 2007, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2007 (Perubahan Atas Data yang dilaporkan sebelumnya)	Rp. 11.000.000	Rp. 13.000.000
2. Motor, merk HONDA BEAT, tahun pembuatan 2009, yang berasal dari HIBAH, perolehan tahun 2008 (Penambahan Data Baru)	—	Rp. 7.000.000

**b. PETERNAKAN,
PERIKANAN,
PERKEBUNAN,
PERTANIAN,
KEHUTANAN,
PERTAMBANGAN DAN
USAHA LAINNYA**

**c. HARTA BERGERAK
LAINNYA**

	20 Agustus 2009	31 Desember 2011
1. LOGAM MULIA, yang berasal dari HASIL SENDIRI DAN HIBAH, perolehan tahun — (Penambahan Data Baru)	—	Rp. 8.000.000
2. BENDA BERGERAK LAINNYA, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan dari tahun 2006 sampai dengan 2008 (Perubahan Atas Data yang dilaporkan sebelumnya)	Rp. 10.000.000	Rp. 12.000.000

3. BENDA BERGERAK LAINNYA, yang berasal dari HASIL SENDIRI DAN HIBAH, perolehan tahun 2008 (Penambahan Data Baru, Perubahan Atas Data yang dilaporkan sebelumnya) Rp. 60.000.000 Rp. 65.000.000

C. SURAT BERHARGA

**D. GIRO DAN SETARA KAS
LAINNYA**

1. Yang berasal dari HASIL SENDIRI (Penambahan Data Harta Kekayaan, Perubahan Data Karena Penambahan/Pengurangan) Rp. 40.936.460 Rp. 62.679.638

E. PIUTANG

1. Piutang dalam bentuk PINJAMAN UANG (Penambahan Piutang baru) Rp. 189.166.460 Rp. 20.512.739

TOTAL HARTA (II) Rp. 189.166.460 Rp. 409.632.274

III. HUTANG

1. Hutang dalam bentuk PINJAMAN BARANG (Penambahan Hutang baru) Rp. 358.000.000 Rp. 358.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II - III) Rp. 189.166.460 Rp. 53.632.274

MENGETAHUI,
DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN
PLT. DEPUTI

Jakarta, 6 Februari 2012
DIREKTORAT PENDAFTARAN DAN
Pemeriksaan LHKPN
DIREKTUR

Anti Corruption Clearing House (ACCH)

- ❖ Anti Corruption Clearing House (ACCH) dirancang sebagai sumber pengetahuan dan informasi yang terdistribusi secara terbuka untuk public “*public knowledge management*” dalam upaya membangun **semangat**, **visi**, dan **budaya antikorupsi**.
- ❖ KPK mengembangkan ACCH sebagai salah satu pilar strategi pencegahan korupsi, dan merupakan platform jejaring antikorupsi dalam menjalankan misi pemberantasan korupsi di Indonesia.

PORTAL ACCH

<http://acch.kpk.go.id>

❖ Anti Corruption Clearing House (ACCH) terimplementasi dalam beberapa program diantaranya adalah **PORTAL ACCH**.


❖ **PORTAL ACCH**

<http://acch.kpk.go.id> Web portal ACCH sebagai wadah online yang berisi data dan informasi mengenai antikorupsi. Beberapa fitur yang terus dikembangkan adalah arsip penindakan (penyidikan, penuntutan, putusan pengadilan) arsip sorotan kasus korupsi, data statistik, edukasi antikorupsi, tanya jawab anti korupsi, publikasi riset dan kajian dan lain-lain.

MANUAL PORTAL ACCH

- ❖ Buka halaman website dengan alamat <http://acch.kpk.go.id>
- ❖ Ketik nama atau NHK (Nomor Harta Kekayaan) Penyelenggara Negara yang anda ingin ketahui TBN nya;
- ❖ Ketik kode validasi sesuai dengan gambar;
- ❖ Klik Go, maka akan ditampilkan daftar pengumuman (TBN) a.n. PN yang dimaksud secara urut berdasarkan tanggal pelaporan;
- ❖ Klik View untuk memilih TBN dimaksud ;
- ❖ Lakukan Sign up (bagi yang belum memiliki account di website ACCH), untuk mendaftarkan email kita.
- ❖ Lakukan Login dengan memasukkan email dan password sesuai dengan yang kita daftarkan sebelumnya;
- ❖ TBN akan ditampilkan dalam pop up, tanpa tombol Save.


<http://acch.kpk.go.id>



anti corruption clearing house

[BERANDA](#) [EDUKASI](#) [PENINDAKAN](#) [STATISTIK](#) [PUBLIKASI](#) [TENTANG ACCH](#)


TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK KABUPATEN SOLOK - SUMATERA BARAT



Mengukur Keberhasilan Kabupaten Solok Dalam Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Sepuluh tahun berjalan, perlulah dilakukan pengukuran tentang tingkat keberhasilan Kabupaten Solok dalam melaksanakan berbagai praktek good government.

Sorotan Kasus




Muhammad Nazaruddin
Ketika menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2009-2014, ia menerima hadiah berupa 5 (lima) lembar cek senilai Rp. 4,675 Miliar. Dan ia pun divonis pidana penjara 7 tahun.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (TBN LHKPN)

Search:

Validation:

KATALOG BUKU PERPUSTAKAAN KPK



KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

http://acch.kpk.go.id

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (TBN LHKPN)

Search:

Nama



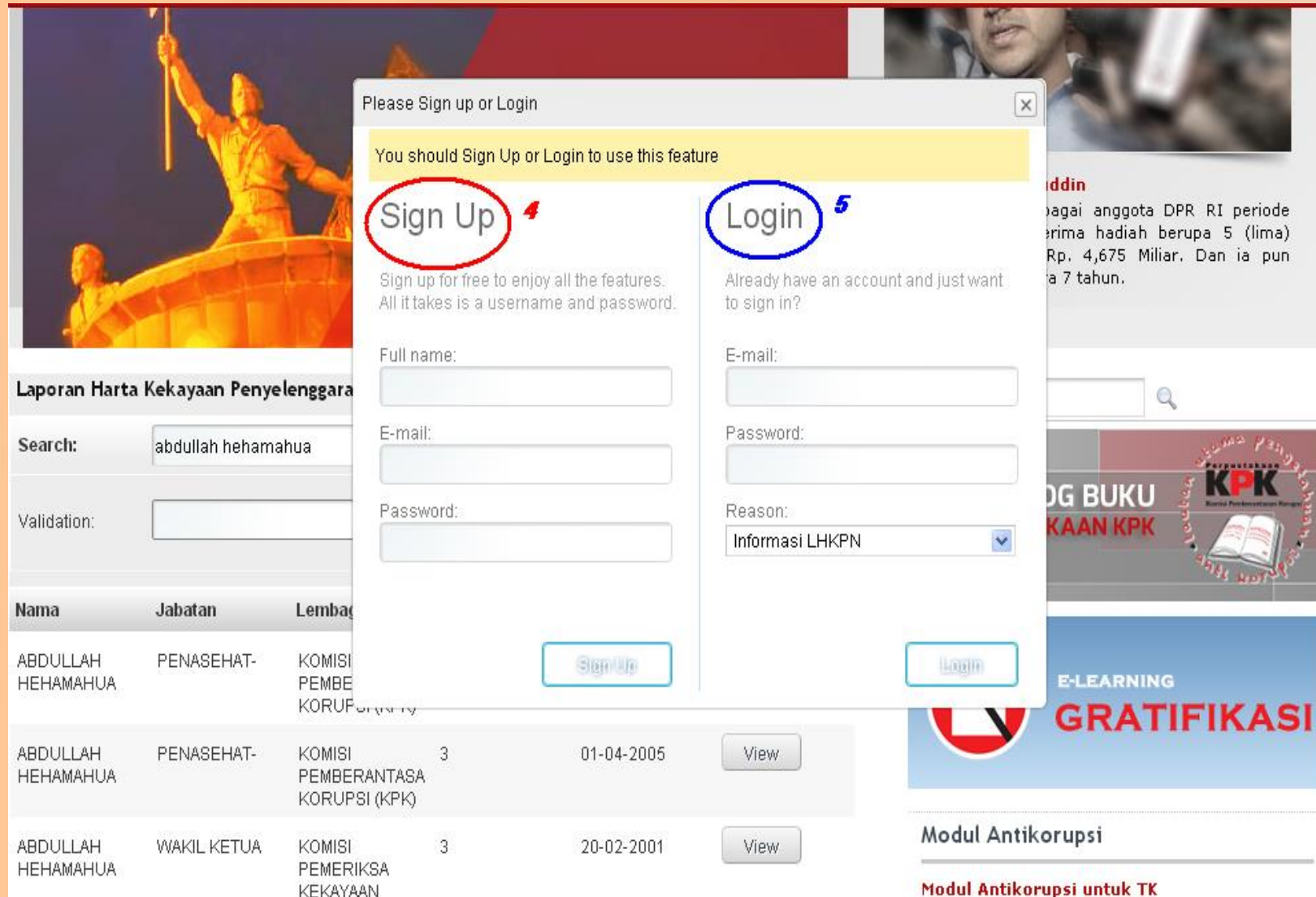
Validation:

908

Go

Nama	Jabatan	Lembaga	NHK	Pelaporan	
ABDULLAH HEHAMAHUA	PENASEHAT-	KOMISI PEMBERANTASA KORUPSI (KPK)	3	16-03-2009	View
ABDULLAH HEHAMAHUA	PENASEHAT-	KOMISI PEMBERANTASA KORUPSI (KPK)	3	01-04-2005	View
ABDULLAH HEHAMAHUA	WAKIL KETUA	KOMISI PEMERIKSA KEKAYAAN PENYELENGGAF NEGARA (KPKPN)	3	20-02-2001	View

http://acch.kpk.go.id



The screenshot displays the KPK ACCH (Akses Cakrawala Kekayaan) portal. A modal window titled "Please Sign up or Login" is centered on the screen, prompting users to either sign up or login to access certain features. The modal includes fields for full name, email, and password, as well as a dropdown menu for the reason of login, currently set to "Informasi LHKPN".

Below the modal, a table titled "Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara" (Asset Report of Officials) is visible. The table lists officials, their positions, and the reporting period. The first three rows are visible:

Nama	Jabatan	Lembaga	Periode	Aksi
ABDULLAH HEHAMAHUA	PENASEHAT-	KOMISI PEMBE		
ABDULLAH HEHAMAHUA	PENASEHAT-	KOMISI PEMBERANTASA KORUPSI (KPK)	3	01-04-2005
ABDULLAH HEHAMAHUA	WAKIL KETUA	KOMISI PEMERIKSA KEKAYAAN	3	20-02-2001

Other elements on the page include a search bar with the text "abdullah hehamahua", a validation field, and a banner for "MODUL ANTIKORUPSI" (Anti-Corruption Module) with the text "MODUL ANTIKORUPSI untuk TK" (Anti-Corruption Module for TK).

http://acch.kpk.go.id

View Detail

1 page of 5 125%

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

2011

Tambahan Berita Negara R.I Tanggal 12 Agustus 2011 No.64
Pengumuman dalam Berita Negara RI sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

**PENGUMUMAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Perubahan atas Laporan Harta Kekayaan yang dilaporkan sebelumnya)**

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ABDULLAH HEHAMAHUA
2. Jabatan : PENASEHAT
3. NHK : 3
4. Alamat Kantor : Jl. HR. RASUNA SAID KAV. C-1, JAKARTA SELATAN
5. Tanggal Pelaporan : 11 Juni 2007, 16 Maret 2009

II. DATA HARTA

**A. HARTA TIDAK BERGERAK
(TANAH DAN BANGUNAN)**

Status Laporan	
11 Juni 2007	16 Maret 2009
Rp. 114.622.500	Rp. 154.602.500

ABDULLAH HEHAMAHUA

Jabatan: PENASEHAT-
Lembaga: KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)
NHK: 3
Pelaporan: 16-03-2009

Disclaimer:
Informasi yang ditampilkan pada situs ini merupakan ikhtisar dari dokumen yang diumumkan pada Berita Negara/Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dan tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan upaya hukum

Mari Berkontribusi

You can **stop**

CORRUPTION



KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

Caranya?



Kita mulai dari keluarga:

- Saling menanyakan asal-usul barang atau uang
- Saling mengingatkan
- Penanaman sifat kejujuran

Ingatkan untuk kebaikan

PLAY

KPK

•Komisi Pemberantasan Korupsi

•Alamat

•Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C 1, Jakarta 12920

•Telp. (021) 2557 8300

•Website : www.kpk.go.id

•LHKPN

•Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN

•Telp. (021) 2557 8396

•Faks. (021) 5292 1230, (021) 5292 1231

•Email: Informasi.lhkpn@kpk.go.id /
pendaftaran.lhkpn@kpk.go.id